# Pengaruh Proactive Fraud Audit dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud

### Zaqia Annaba Awawiyah\*, Pupung Purnamasari

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

**Abstract.** Cases of fraud in the government environment are still rolling. So that a comprehensive study is needed to prevent it, especially in public sector organizations that are oriented towards the public interest. Efforts to identify potential fraud and also minimize fraud itself are by proactive fraud audit and whistleblowing system actions. The purpose of this study was to determine the effect of proactive fraud audit and whistleblowing system on fraud prevention at the representative office of the West Java Province Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), The method used in this study is a verification method with a quantitative approach. The data source used in this research is primary data. The sampling technique used was nonprobability sampling with purposive sampling type and obtained 75 respondents at BPKP West Java Province. The analytical tool used in this research is SmartPLS version 3.2.9. The hypothesis results show that the Proactive Fraud Audit and Whistleblowing System have a positive and significant effect on Fraud prevention at the West Java Province Financial and Development Supervisory Agency (BPKP).

**Keywords:** Proactive Fraud Audit, Whistleblowing System and Fraud Prevention.

Abstrak. Kasus kecurangan dilingkungan pemerintahan hingga saat ini masih bergulir. Sehingga diperlukan adanya kajian komprehensif untuk mencegahnya khususnya pada organisasi sektor publik yang berorientasi pada kepentingan publik. Upaya untuk mengidentifikasi potensi kecuangan dan juga meminimalisir kecurangan itu sendiri adalah dengan tindakan proactive fraud audit dan whistleblowing system. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh proactive fraud audit dan whistleblowing system terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pada Kantor perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah nonprobability sampling dengan jenis purposive sampling dan didapat sebanyak 75 responden pada BPKP Provinsi Jawa Barat. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah SmartPLS versi 3.2.9. Hasil hipotesis menunjukan bahwa Proactive Fraud Audit dan Whistleblowing System berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan Fraud pada Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi jawa Barat.

**Kata Kunci:** Proactive Fraud Audit, whistleblowing system dan Pencegahan Fraud.

<sup>\*</sup> zaqiaannaba05@gmail.com

#### A. Pendahuluan

Dalam menciptakan masyarakat yang makmur adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme, demikian bunyi paragrap pertama sebagai dasar pertimbangan peruahan kedua Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2019 atas Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas dasar tersebut Pencegahan fraud merupakan upaya untuk meminimalisir terjadinya tindakan fraud khususnya organisasi sektor publik yang berorientasi pada kepentingan publik, serta berakibat pada terganggunya pelayanan publik dan pembangunan bangsa, di Indonesia sektor Industri keuangan dan sektor fiskal merupakan dua entitas vital yang memainkan peran sentral dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Lembaga-lembaga audit sektor publik di Indonesia terdiri dari lembaga pemeriksa dari luar pemerintah dan lembaga pemeriksa dari dalam pemerintah. Menurut Taufik (2011), lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat melakukan upaya pencegahan dini terhadap fraud di lingkungan pemerintah untuk mengurangi kerugian keuangan negara dan daerah yang lebih besar. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ketiga lembaga pengawas tersebut adalah badan pengawas daerah provinsi, badan pengawas daerah kabupaten, dan badan pengawas daerah kota, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai inspektorat provinsi, kabupaten, dan kota. Aparat pengawas internal pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional.

Secara konseptual Fraud merupakan tindakan yang disengaja yang dilakukan untuk tujuan tertentu dengan melawan hukum, seperti tindakan ilegal memanipulasi atau memberikan Iaporan.palsu.kepada pihak lain, terutama yang berkaitan dengan laporan keuangan. Fraud memiliki dampak yang sangat signifikan bagi organisasi manapun, jika dalam perusahaan dapat berakibat pada merosotnya reputasi perusahaan, rusaknya moralitas pegawai dan integritas sumberdaya manusia di dalamnya, dan berujung pada organisasi yang akan mengalami kerugian besar dan pelaku juga terancam mendapatkan sanksi pidana. (Sihombing & Rahardjo, 2014)

Secara empirik hasil survei Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) bertajuk Asia Pascific Occupational Fraud tahun 2022 menunjukan bahwa negara Indonesia berada di peringkat ke-4 dengan jumlah fraud sebanyak 23 kasus dan fraud yang paling merugikan adalah penyalahgunaan aset sebesar 28,9 persen, kecurangan laporan keuangan sebesar 6,7 persen, dan korupsi sebesar 64.4 persen.(Puspitanisa & Purnamasari, 2021)

Berdasarkan kajian yuridis, konseptualis dan tinjauan empiris sebagaimana dikemukakan di atas, menunjukan bahwa fenomena fraud telah menggurita dan harus ada kajian komprehensif untuk mencegahnya. Upaya pencegahan tindakan kecurangan ini sudah seharusnya menjadi aktivitas yang dijalankan secara dini, salah satunya dengan tindakan proactive fraud audit. Proactive fraud audit sebagai langkah preventif yang mengarah pada prosedur audit proaktif di mana untuk menemukan potensi kecurangan atau kejahatan yang lebih serius auditor dengan aktif mengumpulkan dan menganalisis informasi (Suastawan et al., 2017).

Selain proactive fraud audit sebagai upaya dalam pencegahan dini tindakan kecurangan. whistleblowing system merupakan cara lain yang dianggap dapat mencegah dan meminimalisir tindakan kecurangan. Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan mengemukakan bahwa whistlebIowing system sebagai bagian dari sistem pengendalian internal dalam pencegahan tindakan kecurangan dan penyimpangan serta mengoptimalkan penerapan praktik good governance. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk mencegah terjadinya fraud adalah pengendalian yang berbasis sistem. Dengan adanya antifraud control system, salah satunya yaitu whistleblowing system dapat menurunkan kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan dan mempercepat pendeteksian atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi (Zarefar & Arfan, 2017).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menerapkan whistleblowing system, dengan tujuan sebagai sarana bagi whistleblower untuk melaporkan dan mengungkapkan fakta terjadinya pelanggaran, menjatuhkan sanksi kepada pegawai yang terbukti melanggar hukum, memperbaiki sistem birokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik kepada kementrian atau lembaga dan pemerintah pada umumnya. Selain itu, penerapan Proactive fraud audit dalam pencegahan fraud pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah dirancang program Fraud Risk Identification untuk membantu aparat pengawasan internal dalam melakukan analisis terhadap informasi awal atau risiko fraud.

Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian yang ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana proactive fraud audit pada Kantor perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat?
- 2. Bagaimana whistleblowing system pada Kantor perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat?
- 3. Bagaimana pencegahan fraud pada Kantor perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat?
- 4. Bagaimana pengaruh *proactive fraud audit* terhadap pencegahan *fraud* pada Kantor perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat?
- 5. Bagaimana pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat?

  Sedangkan tujuan penelitian yang penulis tetapkan adalah sebagai berikut:
- 1. Untuk mengetahui *proactive fraud audit* pada Kantor perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.
- 2. Untuk mengetahui *whistleblowing system* pada Kantor perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat
- 3. Untuk mengetahui pencegahan *fraud* pada Kantor perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.
- 4. Untuk mengetahui pengaruh *proactive fraud audit* terhadap pencegahan fraud pada Kantor perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.
- 5. Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan fraud pada Kantor perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

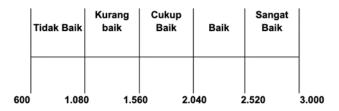
### B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan peneliti adalah metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian yang dipilih adalah seluruh pegawai yang ada pada Kantor perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat dengan total 192 Orang, dengan teknik pengambilan sampel yaitu *nonprobability sampling* jenis *purposive sampling* dengan kriteria responden adalah pegawai yang memiliki jabatan sebagai pejabat fungsional auditor dengan pengalaman kerja selama 3 tahun atau lebih dan jumlah sampel penelitian yang diperoleh sebanyak 75 pegawai. Dalam penelitian digunakan teknik pengumpulan.data yaitu kuesioner, studi pustaka, dan observasi. Adapun teknik analisis data menggunakan Structural Equation Model – Partial LeastSquare (SEM-PLS) dengan program aplikasi SmartPLS 3.2.9.(Nandita & Rosdiana, 2023)

#### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Analisis Statistik Deskriptif Variabel

Berikut merupakan penjelasan mengenai tanggapan dari responden untuk masing-masing item pernyataan kuesioner pada setiap dimensi pada masing-masing variabel:



**Gambar 1.** Garis Kontiinium Pengelompokan Nilai Jawaban Responden Variabel Proactive Fraud Audit

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2024

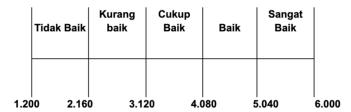
Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai Proactive Fraud Audit pada BPKP Provinsi Jawa Barat, diperoleh total skor yaitu sebesar 2.556. Hal tersebut menunjukan bahwa jawaban responden menghasilan nilai dengan kategori "sangat baik", artinya penerapan Proactive Fraud Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat termasuk kategori "sangat baik".



Gambar 2. Garis Kontiinium Pengelompokan Nilai Jawaban Responden Variabel Whistleblowing System

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2024

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai Whistleblowing System pada BPKP Provinsi Jawa Barat, diperoleh total skor yaitu sebesar 4.313. Hal tersebut menunjukan bahwa jawaban responden menghasilan nilai dengan kategori "Baik", artinya penerapan Whistleblowing System pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat termasuk kategori "baik".



Gambar 3. Garis Kontiinium Pengelompokan Nilai Jawaban Responden Variabel Pencegahan Fraud

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2024

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai Pencegahan Fraud pada BPKP Provinsi Jawa Barat, diperoleh total skor yaitu sebesar 5.140. Hal tersebut menunjukan bahwa jawaban responden menghasilan nilai dengan kategori "sangat baik", artinya Pencegahan fraud yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat termasuk kategori "baik",

### **Outer Model**

Dalam Penelitian ini dilakukan pengukuran model (measurement model) untuk menguji validitas dan reabilitas dari indikator-indikator pembentuk konstruk laten. Berikut adalah hasil uji validitas dan reabilitas masing-masing konstruk laten sesuai dengan output SmartPLS:

Tabel 1. Construct Validity dan Reability

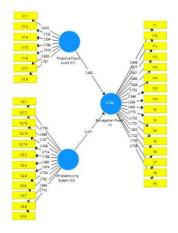
	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Pencegahan Fraud (Y)	0,939	0,946	0,529
<b>Proactive Fraud Audit (X1)</b>	0,856	0,892	0,545
Whistleblowing System (X2)	0,913	0,926	0,514

Sumber: Output SmartPLS 3.2.9, 2024

Berdasarkan nilai Average Variance Extracted pada setiap variabel atau konstruk seperti yang disajikan pada tabel 1 menunjukan bahwa seluruh indikator mampu mewakili setiap konstruk latennya masing-masing dengan baik dan hasil output analisis semua konstruk menghasilkan nilai >0,50 yaitu proactive fraud audit sebesar 0,545, whistleblowing system sebesar 0,514, dan pencegahan fraud sebesar 0,529 artinya semua indikator konstruk adalah valid atau ketiga variabel miliki estimasi validitas yang baik. Selanjutnya composite relibility dan cronbach's alpha memiliki nilai lebih dari 0,7. Variabel proactive fraud audit memiliki nilai cronbach's alpha sebesar 0,856 dan nilai composite reliability sebesar 0,892. Variabel Whistleblowing System memiliki nilai cronbach's alpha sebesar 0,913 dan nilai composite reliability sebesar 0,926. Variabel Pencegahan Fraud memiliki nilai cronbach's alpha sebesar 0,939 dan nilai composite reliability sebesar 0,946. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk laten dalam penelitian bersifat reliabel dan memenuhi uji reabilitas.

#### Inner Model

Model structural atau inner model merupakan tahap yang dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh dari variabel eksogen terhadap endogen (Rahman et al., 2023:88). EvaIuasi modeI strukturaI atau inner model dilakukan untuk melihat kekuatan estimasi variabeI yang dilakukan yaitu dengan melihat nilai R-square (R²) dan nilai F-square (f²). Berikut adalah hasil analisis algorithm yang digunakan untuk evaluasi inner model:



Gambar 1. Hasil Analisis Algorithm

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2024

### **R-Square**

**Tabel 1.** Hasil R-Square.

	R Square	R Square Adjusted	
Pencegahan Fraud (Y)	0,740		0,733

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2024

Berdasarkan.tabeI 1 menunjukkan bahwa.nilai R² pada variabel Pencegahan *Fraud* sebesar 0,740 atau dalam kriteria menunjukkan model moderate, yang berarti kemampuan variabel *proactive fraud audit* (X1) dan *whistleblowing system* (X2) mampu untuk memprediksi atau menjelaskan variabel pencegahan *fraud* (Y) sebesar 74% dengan demikian model tergolong sedang. Sisanya 26% dapat dipengaruhi model lain diluar penelitian ini.

#### F-Square

**Tabel 2.** Hasil F-Square

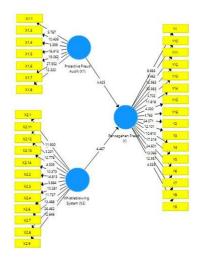
	Pencegahan Fraud (Y)	Proactive Fraud Audit (X1)	Whistleblowing System (X2)
Pencegahan Fraud (Y)			
Proactive Fraud Audit (X1)	0,418		
Whistleblowing System (X2)	0,434		

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2024

Berdasarkan tabeI 2 menunjukkan bahwa Proactive Fraud Audit memiliki nilai f<sup>2</sup> sebesar 0,418 dimana variabel tersebut memiliki pengaruh besar karena lebih dari 0,35. Begitu juga dengan variabel Whistleblowing System yang memiliki nilai f<sup>2</sup> sebesar 0,434 dimana variabel tersebut memiliki pengaruh besar karena nilai yang dihasilkan lebih dari 0,35. Kesimpulannya terdapat pengaruh yang besar dari variabel Proactive Fraud Audit (X1) dan variabel Whistleblowing System (X2) terhadap variabel pencegahan fraud (Y).

### Pengujian Hipotesis atau Uji Signifikansi

Pengujian hipotesis dengan program SmartPLS pada model SEM-PLS dilihat dari nilai perhitungan path coefficients (koefisien jalur) yang dapat dilakukan dengan analisis bootstrapping. Berikut adalah hasil analisis bootstrapping:



Gambar 2. Hasil Analisis Bootstrapping

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2024Gambar 2. Hasil Analisis Bootstrapping

**Tabel 3.** Hasil Koefisien Jalur (Uji Signifikasi)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
Proactive Fraud Audit (X1) -> Pencegahan Fraud (Y)	0,462	0,464	0,104	4,425	0,000
Whistleblowing System (X2) ->	0,471	0,478	0,105	4,467	0,000

Pencegahan Fraud (Y)			l
			ì

Sumber: Hasil PengoIahan Data Penelitian 2024

Berdasarkan tabel 3 menunjukan hubungan antara variabel dependen dan juga variabel independen, dimana variabel *Proactive Fraud Audit* memperoleh T-statistik sebesar 4,425 lebih besar dari T-value 1,96. Original sampel sebesar 0,462 dan bernilai positif, menunjukan bahwa terdapat hubungan antara *Proactive Fraud Audit* terhadap pencegahan fraud  $(X1 \rightarrow Y)$  adalah positif. Kemudian dilihat dari nilai P value sebesar 0,000.< 0,05 maka Ha diterima atau Ho ditolak atau dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *Proactive Fraud* Audit terhadap pencegahan *fraud*. Sementara variabel *Whistleblowing System* memperoleh T-statistik sebesar 4,467 lebih besar dari T-value 1,96. Original sampel sebesar 0,471 dan bernilai positif, menunjukan bahwa terdapat hubungan antara *Whistleblowing System* terhadap pencegahan *fraud*  $(X1 \rightarrow Y)$  adalah positif. Kemudian dapat dilihat dari nilai P value sebesar 0,000.< 0,05 maka Ha diterima atau Ho ditolak atau dapat.disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *Whistleblowing System* terhadap pencegahan *fraud*.

#### Pembahasan

### Pengaruh Proactive Fraud Audit (X1) terhadap pencegahan Fraud (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka diperoleh nilai original sampel sebesar 0,462 dan nilai T-statistik sebesar 4,425 dengan arah positif, maka nilai T-statistik 4,425 > nilai T-tabel 1,96 dan nilai P value sebesar 0,000 < 0,05 dengan demikian Ha diterima atau Ho ditolak, artinya hasil tersebut menunjukan variabel *Proactive fraud audit* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud pada BPKP Provinsi Jawa Barat. Kemudian hasil pengujian dari F-Square yang menunjukkan bahwa *Proactive Fraud Audit* memiliki nilai f² sebesar 0,418. Variabel tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pencegahan *fraud* pada BPKP Provinsi jawa Barat karena nilai yang dihasilkan lebih dari 0,35. Sedangkan untuk hasil R-Square diperoleh nilai R² sebesar 0,740 atau dalam kriteria menunjukan model moderate, yang berarti variabel *Proactive fraud audit* (X1) mampu untuk memprediksi atau menjelaskan variabel pencegahan *fraud* (Y) sebesar 74% dan sebesar 26% dapat dipengaruhi oleh model lain diluar penelitian ini.

### Pengaruh Whistleblowing System (X2) terhadap pencegahan Fraud (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka diperoleh nilai original sampel sebesar 0,471, nilai T-statistik sebesar 4,467 dengan arah positif, maka nilai T-statistik 4,467 > nilai T-tabel 1,96 dan nilai P value sebesar 0,000 < 0,05 dengan demikian Ha diterima atau Ho ditolak, artinya hasil tersebut menunjukan variabel *Whistleblowing System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada BPKP Provinsi Jawa Barat. Kemudian hasil dari pengujian F-Square menunjukkan bahwa *Whistleblowing System* memiliki nilai sebesar 0,434. Variabel tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pencegahan *fraud* pada BPKP Provinsi Jawa Barat karena nilai yang dihasilkan lebih dari 0,35. Sedangkan hasil R-Square diperoleh nilai sebesar 0,740 atau dalam kriteria menunjukan model moderate, yang berarti variabel *whistleblowing system* (X2) mampu untuk memprediksi atau menjelaskan variabel pencegahan *fraud* (Y) sebesar 74% dan sebesar 26% dapat dipengaruhi oleh model lain diluar penelitian ini.

### D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian, maka kesimpulan yang diperoleh adalah:

- 1. Penerapan *Proactive Fraud Audit* pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat termasuk kategori "sangat baik", hal tersebut dapat dilihat dari pejabat fungsional Auditor Perwakilan BPKP provinsi jawa barat yang sangat baik dalam mengimplementasikan *Proactive Fraud Audit*.
- 2. Penerapan *whistleblowing system* pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat termasuk kategori "baik", hal tersebut dapat dilihat dari pejabat fungsional Auditor Perwakilan

- BPKP provinsi jawa barat yang baik dalam mengimplementasikan whistleblowing
- 3. Pencegahan fraud yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat termasuk kategori "baik", hal tersebut dapat dilihat dari pejabat fungsional Auditor Perwakilan BPKP provinsi jawa barat yang mampu mencegah terjadinya tindakan kecurangan (fraud) dengan baik.
- 4. Proactive fraud Audit memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud pada kantor perwakilan BPKP Provinsi jawa Barat. Apabila Proactive Fraud Audit ditingkatkan maka semakin besar pengaruhnya dalam mencegah terjadinya fraud.
- 5. Whistleblowing System memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud pada kantor perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, yang berarti bahwa semakin besar dan positif whistleblowing system maka akan sangat berpengaruh secara signifikan dalam pencegahan terjadinya fraud pada BPKP Provinsi Jawa barat.

## Acknowledge

Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Pupung Purnamasari, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing yang memberikan berbagai saran, kritik, dan motivasi kepada penuis. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga, sahabat, dan pihak-pihak yang senantiasa memberi support dan mendoakan penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian dengan baik dan tepat waktu.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] ACFE. 2022. Occupational Fraud 2022: A Report to the nations.
- Rahman, D., et al. (2023). Laboratorium Metode Penelitian. Bandung: Fakultas Ekonomi [2] dan Bisnis Universitas Islam Bandung.
- Suastawan, I. M. D. P. 2017. Pengaruh Budaya Organisa, Proactive Fraud Audit, Dan [3] Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana. E-Journal S1 Ak Univ. Pendidikan Ganesha, 1, 1–12.
- Taufik, T. 2011. Pengaruh Peran Inspektorat Daerah Terhadap Pencegahan Kecurangan. [4] Pekbis Jurna, 3(2), 512-520.
- [5] Zarefar, A., & Arfan, D. T. 2017. Efektivitas Whistleblowing System Internal. In Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis (Vol. 10, Issue 2). http://jurnal.pcr.ac.id
- Nandita, F., & Rosdiana, Y. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal dan Disiplin Kerja [6] terhadap Kepuasan Kerja Pegawai. ICONOMICS: Journal of Economy and Business,
- Puspitanisa, W., & Purnamasari, P. (2021). Pengaruh Whistleblowing System dan [7] Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan Fraud. Jurnal Riset Akuntansi, 1(1), 42–46. https://doi.org/10.29313/jra.v1i1.188
- Sihombing, K. S., & Rahardjo, S. N. (2014). Analisis Fraud Diamond dalam Mendeteksi [8] Financial Statement Fraud (Studi Empiris pada Perusahaan manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010 – 2012). Diponegoro Journal of Accounting, 3(2), 1– 12. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting